



**SIANDINI**

Sistem Informasi Peringatan Dini  
Inflasi Kabupaten Sumbawa

# PROFIL SISTEM INFORMASI PERINGATAN DINI INFLASI KABUPATEN SUMBAWA (SIANDINI)



**SUMBAWA BESAR  
2018**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pada triwulan akhir tahun 2017, media nasional dihebohkan dengan kebijakan impor beras 500 ribu ton. Kebijakan impor adalah domain Kementerian Perdagangan. Namun pada sisi lain, Kementerian Pertanian menyatakan baru selesai panen raya. Tidak perlu impor beras. Salah satu televisi swasta, Metro TV, yang punya program acara *Economic Challenge*, membahas permasalahan ini bersama para pakar dan pejabat publik terkait yang Salah satu hasil diskusi itu adalah perlunya *amnesty* data. Kekeliruan data mengakibatkan kelirunya kebijakan.

Setelah kebijakan impor beras pada akhir tahun 2017, pada awal bulan februari 2018, beredar informasi di media-media nasional bahwa terjadi kenaikan harga beras. Publik heboh lagi. Kenaikan harga beras akan berakibat pada kenaikan angka kemiskinan. Jakarta dan daerah-daerah di Pulau Jawa segera melakukan operasi pasar. Media-media di NTB juga tidak kalah hebohnya. Berita-berita kenaikan harga beras jadi headline di halaman 1 dan mengirimkan pesan: “rakyat menjerit, segera lakukan operasi pasar”.

Info “harga beras naik” juga menjalar ke Kabupaten Sumbawa. Bulog Sumbawa yang pada bulan januari baru mendistribusikan rastra 2018 di Kabupaten Sumbawa menginformasikan kepada Pemkab Sumbawa akan melakukan operasi pasar karena ada instruksi dari pusat agar segera melakukan operasi pasar. Beberapa hari setelah operasi pasar dilakukan, di sebuah forum pertemuan, Kepala Bulog Sumbawa menyatakan: “beras yang dijual murah pada kegiatan operasi pasar di Sumbawa, sepi peminat”.

Secara sederhana, meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus disebut inflasi. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Selama ini, Pemda sering terlambat dalam melakukan langkah-langkah antisipatif terkait dengan terjadinya lonjakan atau fluktuasi harga pada barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi publik. Tentu saja kondisi tersebut merugikan masyarakat padahal Pemda sudah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang bertanggung jawab dalam pemantauan dan pengendalian inflasi. Pun jika dilaksanakan langkah-langkah terkait dengan fluktuasi harga, cenderung mengikuti kondisi-kondisi dari Pulau Lombok yang kondisinya berbeda dengan Sumbawa.

TPID yang dibentuk oleh pemerintah daerah beranggotakan unsur-unsur kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dengan Bupati sebagai Ketua TPID dan Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Harian. Unsur Bank Indonesia duduk sebagai Wakil Ketua. Dilihat dari komposisi Tim TPID, maka unsur-unsur tersebut adalah unsur pengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan yang bersifat strategis, maka prosesnya harus didasarkan pada data dan informasi yang valid, dan tata kelola yang baik agar keputusan yang diambil bisa bermanfaat, tepat guna dan tepat sasaran.

Sementara itu, fakta yang terjadi dalam tata kelola TPID Sumbawa, data atau info harga yang menjadi input utama bagi TPID belum terorganisir dengan baik yang akan berdampak pada rekomendasi kebijakan yang tidak komprehensif. Pun demikian, BPS yang menjadi otoritas data dan statistik hanya mengambil sampel tentang harga dan IHK di kota. Hal ini berdampak pada bias informasi di wilayah kabupaten yang non IHK. Ketika TPID kabupaten non IHK melakukan pembahasan informasi dan mengambil keputusan pada data dan informasi yang bersifat makro tersebut maka yang terjadi di kabupaten adalah bias informasi. Dengan demikian, maka kebijakan atau keputusan yang dihasilkan oleh TPID belum tepat guna dan belum tepat sasaran.

Maka, dari fenomena di atas, inflasi yang diharapkan adalah inflasi rendah dan stabil. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh TPID setidaknya harus bersifat antisipatif terhadap fluktuasi harga dan prospektif terhadap sistem logistik daerah.

Karena sifat inflasi yang akan berdampak luas bagi perekonomian, sosial, dan infrastruktur daerah, maka diperlukan inovasi yang mampu menjadi “*acceleration engine*” dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada stabilisasi inflasi, tata kelola produksi, dan pemantapan sistem logistik daerah. Selain itu juga dapat menjadi referensi bagi swasta.

## **2. Keterkaitan Inovasi dengan Tema RKP 2019**

Inovasi yang bernama SIANDINI Sumbawa yang berperan menjadi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *Decision Support System* (DSS) dengan gambaran keputusan TPID sebagai hulu kebijakan dan keputusan, masyarakat sebagai hilir dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Artinya, SIANDINI menjadi pendukung bagi lahirnya kebijakan yang responsif dari TPID, menjadi sistem dalam implementasi kebijakan yang tersinergi antar OPD, menjadi pemandu kerjasama dengan swasta, dan menjadi penggerak partisipasi masyarakat.

Seperti diketahui, fokus TPID adalah pengendalian harga. Harga adalah puncak dari aktivitas ekonomi dan produksi masyarakat. Fluktuasi harga yang tidak terkendali dan tidak stabil akan menurunkan daya beli dan memperburuk iklim investasi yang bermuara pada stabilitas perekonomian yang dapat memicu masalah sosial serta menghasilkan pertumbuhan yang tidak berkualitas. Dengan kata lain, kemiskinan akan meningkat dan wilayah menjadi rentan serta rawan.

Dengan demikian, Inovasi SIANDINI Sumbawa yang menjadi *supporting system* bagi TPID dalam melaksanakan tugas pengendalian inflasi dengan objek utamanya adalah harga komoditi yang dibutuhkan publik menjadi sangat relevan dengan tema RKP 2019 karena dengan melakukan pengendalian harga komoditi maka konsekuensi logis dari hal tersebut adalah melakukan intervensi pada aspek-aspek pembentuk harga misalnya faktor produksi, tenaga kerja, pengangkutan, sistem logistik, jasa keuangan, pelayanan umum, energi, preferensi pasar dan lainnya yang membutuhkan sinergitas antara pemerintah daerah-pemerintah pusat,

swasta dan masyarakat. SIANDINI bahkan, bisa menjadi *supporting system* bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

### 3. Tujuan

- a. Mewujudkan TPID yang responsif melalui sistem peringatan dini (*early warning system*) inflasi dalam rangka menghasilkan kebijakan dan langkah antisipatif, kuratif dan preventif bagi kepentingan publik.
- b. Menghasilkan analisa dan rekomendasi yang komprehensif tentang inflasi untuk digunakan sebagai referensi bagi TPID dalam mengambil pilihan-pilihan keputusan.
- c. Meningkatkan responsifitas OPD dalam melaksanakan peran dan tupoksi yang sinergis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bagi kepentingan publik.

### 4. Output yang dihasilkan

Output dari SIANDINI adalah sistem informasi berbasis IT yang mengintegrasikan seluruh kepentingan yang berhubungan dengan pengendalian harga yang menghasilkan peringatan dini inflasi berbasis big data. SIANDINI dapat dilihat di situs: [www.siandini.sumbawakab.go.id](http://www.siandini.sumbawakab.go.id).

### 5. Outcome yang Akan Dicapai

**Outcome SIANDINI adalah sebagai berikut:**

1. Tersedianya data base harga real time bagi perkembangan harga di Sumbawa;
2. Tersedianya analisis harga dan peramalan terhadap trend harga yang komprehensif dalam pengukuran WtW, MtM, dan YoY.
3. Tersedianya rekomendasi berdasarkan info harga real yang diklasifikasikan berdasarkan komoditi bahan kebutuhan pokok dan barang penting sesuai Perpres 71 Tahun 2015;
4. Tersusunnya kebijakan yang antisipatif, kuratif, dan preventif bagi kepentingan publik yang tepat sasaran dan tepat guna;
5. Terlaksananya edukasi dan literasi inflasi bagi publik;
6. Tersedianya referensi pasar bagi swasta;
7. Siandini bisa menjadi referensi tata kelola inflasi daerah bagi seluruh kabupaten Non IHK;
8. Tersedianya referensi teknokratik bagi perencanaan pembangunan dan penganggaran APBD.

## B. PENDEKATAN STRATEGIS

### 1. Landasan Teori

Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

**Pertama**, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

**Kedua**, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. **Ketiga**, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa inflasi memberikan pengaruh yang signifikan bagi sektor lainnya. Mempengaruhi kehidupan publik. Pengabaian pada inflasi adalah pengabaian pada kepentingan-kepentingan publik. Walaupun inflasi adalah suatu hal yang penting, namun karena mengandung muatan-muatan yang rumit dan kompleks, dapat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, dan membutuhkan pengamatan yang berkala terhadap harga-harga barang.

Bagi pengambil keputusan dalam hal ini adalah Tim TPID yang terdiri dari para pejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk selanjutnya dilaksanakan oleh perangkat daerah tentu tidaklah cukup waktunya untuk mengamati harga-harga barang secara terus menerus kemudian menganalisa dan menghasilkan pilihan-pilihan kebijakan. Maka dari itu, TPID penting didukung oleh apa yang disebut dengan Sistem Pendukung Keputusan (SPK).

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) secara sederhana adalah sebuah sistem yang digunakan sebagai alat bantu menyelesaikan masalah untuk membantu pengambil keputusan (manajer) dalam menentukan keputusan tetapi tidak untuk menggantikan kapasitas manajer namun hanya memberikan pertimbangan. SPK ditujukan untuk keputusan-keputusan yang memerlukan penilaian atau pada keputusan-keputusan yang sama sekali tidak dapat didukung oleh algoritma (Turban & Jay, 1998)<sup>2</sup>.

Konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *Decision Support Systems* (DSS) pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision Systems,

Menurut Marimin (2004)<sup>3</sup>, Sistem Pendukung Keputusan mempunyai empat karakteristik utama, yaitu :

1. SPK menggabungkan data dan model menjadi satu bagian;
2. SPK dirancang untuk membantu para pengambil keputusan dalam proses pengambilan masalah yang bersifat semi struktural;

---

<sup>1</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses tanggal 28 Januari 2018

<sup>2</sup> Turban, Efraim dan E.Aronson, Jay. *Decision Support System and Intelligent System*. Penerbit Prentice-Hall Internatiol,inc :USA. 1998. Diakses melalui

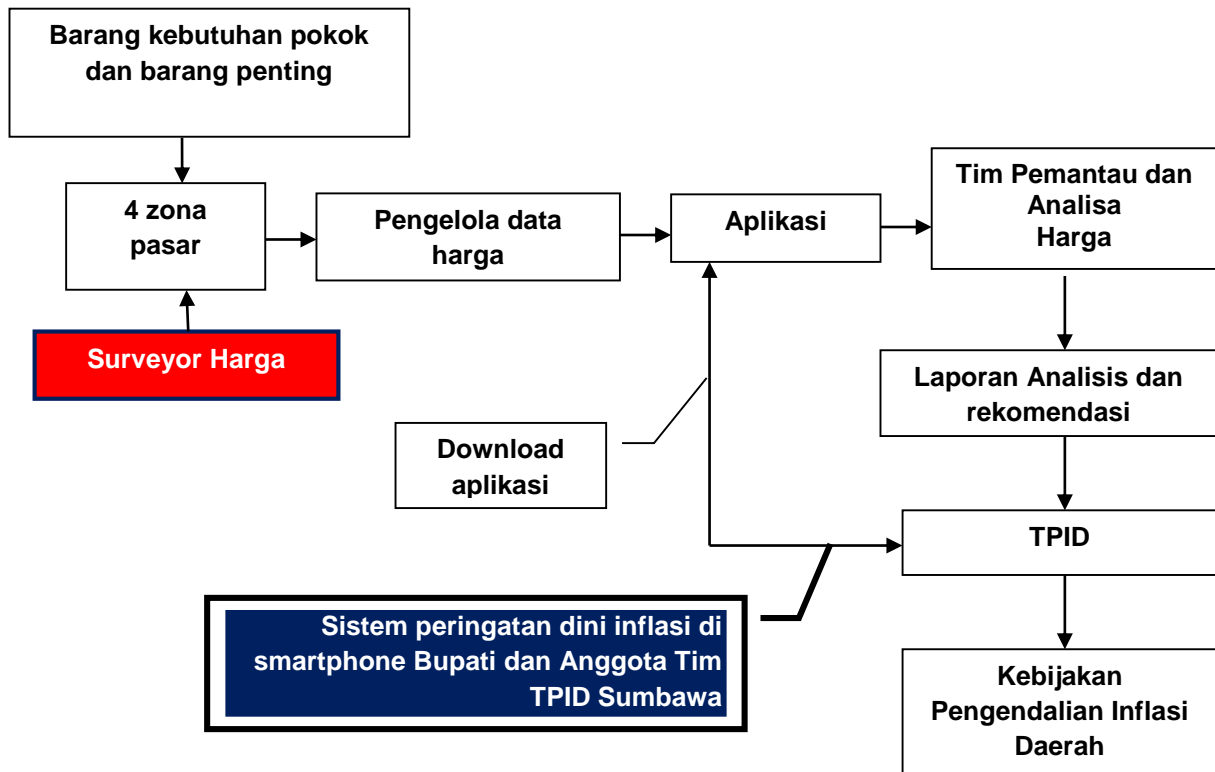
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48158/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

<sup>3</sup> Marimin, M.Sc., Prof., Dr., Ir (2004). *Teknik dan Aplikasi Pengambil Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana Indonesia. Diakses melalui *ibid*.

3. SPK lebih cenderung dipandang sebagai penunjang penilaian manajer dan sama sekali bukan untuk menggantikannya;
4. Teknik SPK dikembangkan untuk meningkatkan efektifitas dari pengambil keputusan.

Berdasarkan tinjauan di atas, “SIANDINI Sumbawa” adalah salah satu bentuk dari system pendukung keputusan atau *decision support system* untuk mengambil keputusan dan tindakan nyata yang tepat, cepat, dan efektif terhadap inflasi di Kabupaten Sumbawa.

## 2. Kerangka Fikir “SIANDINI Sumbawa”



## 3. Strategi Pelaksanaan Inovasi

Sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa “SIANDINI Sumbawa” adalah system pendukung keputusan atau *decision support system* (DSS) bagi Bupati Sumbawa sebagai top manager leader dan anggota tim TPID dalam rangka melakukan pengendalian inflasi daerah dengan strategi sebagai berikut:

- a. TPID diketuai oleh bupati, beranggotakan para kepala perangkat daerah dan organisasi lain yang dianggap perlu untuk mengendalikan inflasi daerah yang rendah dan stabil. Artinya, TPID adalah forum pengambil keputusan;
- b. Salah satu tugas TPID adalah mengidentifikasi harga barang pokok dan barang penting yang dibutuhkan oleh publik kemudian dianalisa untuk mengambil keputusan yang selanjutnya dituangkan dalam kebijakan untuk diaplikasikan di lapangan;
- c. TPID sebagai sebuah forum pengambil keputusan yang akan mempengaruhi banyak sektor harus memperhatikan data kemudian mengolahnya menjadi informasi, selanjutnya menghasilkan pilihan-pilihan keputusan untuk

ditetapkan menjadi keputusan bersama. Seluruh rangkaian tahapan ini jika dilaksanakan secara terstruktur, maka forum TPID menjadi tidak efisien karena TPID terdiri dari para pemangku keputusan yang memiliki ruang dan waktu yang terbatas. Artinya, sepatutnya forum TPID cukup membahas pilihan-pilihan keputusan dan kebijakan untuk ditetapkan dan disepakati. Jika tidak, maka keputusan yang akan dihasilkan besar kemungkinan terjadi *bias* yang pada akhirnya tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna.

- d. Berdasarkan hal tersebut di atas, Sistem Pendukung Keputusan menjadi penting untuk diterapkan. SPK atau DSS yang melakukan pengumpulan data, pengorganisasian data, menganalisis data, mengolah menjadi informasi, menentukan model, menghasilkan rekomendasi, dan menghasilkan pilihan-pilihan kebijakan yang akan diambil dan dibahas di dalam forum TPID. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dalam TPID menjadi lebih efektif dan efisien.
- e. Inflasi yang dibentuk oleh harga-harga barang yang beragam, maka diperlukan sebuah sub system yang mempermudah TPID dalam melaksanakan tugas dan perannya itu. Sub system inilah yang bekerja untuk memperkuat data dan informasi yang akan ditransfer dalam bentuk *policy brief* kepada TPID. TPID terhindar dari kerumitan data.
- f. Untuk mempermudah kerja sub system dengan system, maka dibutuhkan sebuah system dan aplikasi yang mengolah semua data-data dan informasi harga untuk dibahas dalam tim pemantauan dan analisa harga yang nantinya menghasilkan *policy brief* bagi bupati dan tim TPID.
- g. Sistem pemantauan harga yang dilakukan dengan survey di pasar tradisional dan pasar modern yang selanjutnya diolah oleh sebuah aplikasi harus menjembatani interaksi yang menghasilkan respon berdasarkan tingkat keseriusan dan kegawatan melalui sebuah peringatan dini.
- h. SIANDINI Sumbawa, selain melakukan pengolahan dan analisis data, juga memberikan peringatan dini inflasi bagi TPID Kabupaten Sumbawa.

#### **4. Keunikan dan Kebaruan**

##### **a. Keunikan**

Keunikan sistem dan aplikasi ini adalah adanya peringatan dini (*early warning*) yang langsung ditampilkan di smartphone Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dan Anggota Tim TPID yang akan membantu Pemda untuk memberikan respon cepat dan tanggap terhadap perubahan-perubahan harga barang pokok dan penting.

##### **b. Kebaruan**

1. Sudah ada beberapa aplikasi informasi harga, tapi tanpa disertai dengan system alert peringatan dini dan tanpa analisis dan rekomendasi bagi Pemda, masyarakat dan swasta. Sistem dan aplikasi hasil inovasi ini akan memberikan analisis, rekomendasi dan peringatan dini bagi pemda. Edukasi dan literasi masyarakat, dan referensi bagi swasta dalam melakukan investasi. Banyak beredar aplikasi info harga, tapi hanya

SIANDINI Sumbawa yang memberikan info harga dan menjadi Sistem Pendukung Keputusan;

2. Selama ini info harga bersumber dari 2 (dua) kota. Mataram dan Kota Bima sehingga menjadi bias untuk mendefinisikan dan menyelesaikan masalah inflasi di Sumbawa yang tidak menjadi lokasi sumber data/informasi harga. Info harga yang akan jadi data base sistem ini adalah info harga real yang terjadi di Sumbawa.

## **5. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi**

Setelah pembangunan sistem selesai pada Tahun Anggaran 2018 dengan rangkaian uji coba dan penyelarasan dengan berbagai platform teknologi, SIANDINI saat ini dalam tahap pengembangan dan melaksanakan perannya sebagai *Decisions Support System*. Pengembangan dari sisi teknologi dilakukan dalam bentuk aplikasi berbasis Android dan IOS agar pengendalian harga ada dalam genggaman.

Dari sisi arus informasi, input data dilakukan melalui sistem elektronik. Tahun 2019 akan dilaksanakan di 2 (dua) pasar, yaitu Pasar Brang Biji dan Pasar Brang Bara yang sebelumnya dilakukan pada 1 (satu) kawasan saja yaitu di Pasar Seketeng Sumbawa Besar.

Dari sisi konten, data atau info harga konsumen disandingkan juga dengan info harga di tingkat petani, info stock komoditi di gudang pemerintah dan swasta sehingga dapat ditentukan margin pengangkutan dan perdagangan dari tiap komoditi dan menjadi input yang berguna bagi penataan tata niaga Kabupaten Sumbawa dan sistem logistik daerah.

## **6. Masalah Yang Dihadapi**

Masalah yang dihadapi antara lain:

- a. Kapasitas surveyor dalam menghasilkan data yang benar-benar valid dan jujur dilaksanakan di titik yang telah ditentukan;
- b. Keterbukaan informasi tentang stock komoditi yang ada di pihak swasta terbatas;
- c. Tingkat responsifitas antisipasi peringatan dini inflasi dari SIANDINI yang masih lemah di OPD teknis

## **7. Keberhasilan Yang Telah Dicapai**

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain:

- a. Koordinasi aksi dan evaluasi antar satker secara berkala terjadi dengan adanya Tim Pemantau dan Analisa Perkembangan Harga (SK Bupati Nomor 201 Tahun 2018). Indikator: Laporan analisa dan rekomendasi kebijakan secara berkala
- b. Basis Data terorganisir dengan baik yang selama ini sektoral dan tidak dipergunakan sebagai input kebijakan. Indikator: satu data dalam sistem SIANDINI. (lihat [www.siandini.sumbawakab.go.id](http://www.siandini.sumbawakab.go.id))



- c. Melalui rangkaian yang sinergis dengan beberapa OPD yang terkait, Sistem Resi Gudang Bage Tango dioperasikan. Indikator: kerjasama Pengelola SRG, OPD, Bank BRI, Kepala Desa, BUMDesa, dan Poktan;
- d. SIANDINI masuk dalam TOP-10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi NTB tahun 2018. (SK Gubernur NTB Nomor 067-867 Tahun 2018;

## **C. INPUT**

### **1. Anggaran**

- a. Tahun 2018: Total Rp.190.000.000,- Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah. Untuk Pembuatan aplikasi SIANDINI sebagai *tools* dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,-
- b. Tahun 2019: Total Rp. 152.457.440,- Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah. Untuk maintenance dan pengembangan SIANDINI dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,-

### **2. Sumberdaya Manusia**

- a. Tim TPID (SK Bupati Sumbawa Nomor 187 Tahun 2018)
- b. Tim Pemantau dan Analisa Perkembangan Harga (SK Bupati Sumbawa Nomor 201 Tahun 2018)
- c. Tim Programmer;
- d. Tim Survey dan Pengolah Data.

### **3. Metode Pelaksanaan**

- a. Pengambilan data dengan oleh tim survey melalui Dinas Koperasi UKM dan Indag di Pasar yang telah ditentukan dengan daftar komoditi berdasarkan Perpres 71 Tahun 2015;
- b. Input Data melalui [www.siandini.sumbawakab.go.id](http://www.siandini.sumbawakab.go.id)
- c. Data masuk dalam sistem dan diolah berdasarkan formula yang telah diatur sehingga menghasilkan indeks perkembangan harga;
- d. Indeks perkembangan harga menghasilkan peringatan dini inflasi;
- e. Hasil analisis data oleh sistem dibahas dalam Rakor Tim Pemantau dan Analisa Harga (TPAPH) untuk memverifikasi sebab dan risiko inflasi;
- f. TPAPH menyusun rekomendasi kebijakan yang diserahkan dan dibahas dalam Rapat Strategis Forum TPID Kabupaten Sumbawa;
- g. Perancangan regulasi daerah dan tindak lanjut hasil keputusan TPID.

### **4. Kelembagaan**

Kelembagaan SIANDINI saat ini masih dalam bentuk SK Bupati Sumbawa. Ke depan, SIANDINI ditingkatkan ke dalam bentuk Peraturan Bupati.

### **5. Sarana dan Prasarana yang diperlukan**

- a. Komputer
- b. Smartphone

#### D. RENCANA KERJA

No	Kegiatan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Keterangan
1	Penetapan personalia tim pemantauan dan analisa harga						Minggu I: Tim analis dan surveyor harga
2	Penyusunan KAK pengembangan aplikasi berbasis Android dan IOS						Minggu I
3	Prototype pengembangan aplikasi SIANDINI generasi II						Minggu II
4	Trial-Error System						Oleh Tim Pemantau dan Analis harga
5	Uji operasional integrasi data dengan info harga tingkat petani, pengumpul, dan data stock						Oleh Tim Pemantau dan Analis harga

#### E. PENUTUP

SIANDINISumbawa beserta system yang berada di dalamnya akan memberikan manfaat dan kemudahan bagi pengambilan keputusan tentang inflasi daerah dan akan memberikan kontribusi yang positif bagi publik. Aplikasi ini bukanlah segalanya. Kecanggihan yang sejati ada pada diri manusia sebagai makhluk yang paripurna. Itulah mengapa setiap teknologi yang mendekati fungsi-fungsi yang ada pada diri manusia, maka segera label “canggih” disematkan.

Sebagaimana pengajuan aplikasi ini dilakukan dengan harapan bahwa “SIANDINI Sumbawa” hanya sebuah system dan alat untuk memudahkan pekerjaan yang tadinya sulit dan rumit bisa menjadi lebih mudah dan sederhana. Lebih sederhana untuk mengelola dan menganalisa data dinamis yang besar, lebih mudah menyusun rekomendasi dan pilihan kebijakan bagi TPID Kabupaten Sumbawa.

Maka dari itu, dokumen inovasi ini diajukan dengan sungguh-sungguh sebagai sebuah inovasi tata kelola dan menjadi bagian dari Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) bagi TPID Kabupaten Sumbawa untuk memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. Selain itu, SIANDINI Sumbawa memiliki peluang replikasi yang terbuka terutama bagi seluruh kabupaten Non IHK di Indonesia.

Atas dasar uraian di atas, dokumen inovasi yang diajukan ini perlu mendapatkan perhatian sebagai kontribusi Sumbawa untuk Indonesia.